

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Otonomi daerah secara resmi berlaku di Indonesia sejak tahun 2001 memiliki tujuan untuk mewujudkan kemandirian keuangan daerah, sehingga pemerintah daerah tidak bergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat. Otonomi daerah memberikan wewenang kepada daerah untuk mencari sumber penerimaan di wilayahnya sendiri yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Wewenang pemerintah daerah untuk mencari sumber penerimaan sendiri terwujud dalam struktur pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pemerintah daerah dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerahnya melalui PAD. Semakin tinggi PAD menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan pembiayaan juga semakin tinggi (Ariani dan Putri, 2016). Akan tetapi selama Tahun 2020 PAD di sejumlah daerah di Karesidenan Surakarta mengalami penurunan. Penurunan yang terjadi selama tahun 2020 diduga akibat adanya Pandemi *Corona Virus Disease-19*. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik

Provinsi Jawa Tengah, Kota Surakarta mengalami penurunan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dari 546 miliar di tahun 2019 menjadi 492 miliar di tahun 2020. Kabupaten Karanganyar mengalami penurunan penerimaan PAD di tahun 2020. Kabupaten Wonogiri juga mengalami penurunan pendapatan asli daerah dari 287 miliar menjadi 274 miliar. Selain itu penerimaan pajak daerah yang bersumber dari sektor wisata mengalami penurunan yang cukup drastis akibat pandemi Covid-19 salah satunya Kabupaten Boyolali. Beberapa tempat wisata di Boyolali harus ditutup akibat kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat, selain itu juga jumlah kunjungan wisatawan juga menurun (Solopos.com, 2021). Kabupaten Sragen juga mengalami penurunan pendapatan asli daerah selama masa pandemi covid-19 akibat tidak terealisasinya pajak daerah saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM) selain itu, kondisi perekonomian yang terganggu secara umum juga berpengaruh. Berikut tabel 1.1. rata-rata pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota Karesidenan Surakarta 2017-2021.

Tabel 1.1.
Rata-Rata Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Karesidenan Surakarta 2017-2021

Tahun	Rata-Rata Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Karesidenan Surakarta 2017-2021	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah
2017	415,056,767,788	
2018	378,079,786,910	-8.9%
2019	393,593,277,271	4.1%
2020	397,507,361,132	1.0%
2021	413,504,522,472	4.0%

Sumber: Badan Pusat Statistika (diolah peneliti)

Berdasarkan Tabel 1.1. pada tahun 2018 pertumbuhan rata-rata PAD Kabupaten/Kota Karesidenan Surakarta juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Penurunan PAD yang terjadi dapat menjadi indikasi terjadi penurunan kinerja keuangan daerah dari sisi pendapatan.

Dilihat dari kontribusi PAD terhadap APBD di Kabupaten/Kota Karesidenan Surakarta, rata-rata PAD di Kabupaten/Kota Karesidenan Surakarta menyumbang sebesar 18 % terhadap total pendapatan daerah. Dana perimbangan menyumbang sebesar 65% terhadap total pendapatan daerah dan pendapatan lain-lain menyumbang sebesar 17% terhadap total pendapatan daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten/Kota di Karesidenan Surakarta masih tergantung terhadap pemerintah pusat. Menurut Simanjuntak (2002) menyatakan bahwa semakin besar kontribusi PAD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maka semakin kecil tingkat ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat. Sebaliknya jika semakin rendah kontribusi PAD dalam APBD maka semakin besar ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat, sehingga peran pemerintah pusat dalam mengalokasikan anggaran ke daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah cenderung lebih dominan. Dikutip dari Antaranews.com (2021) serta penelitian terdahulu adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah diantaranya adalah pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Faktor yang dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah menarik untuk dianalisis.

Pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan pemerintah melalui belanja daerah. Belanja daerah digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan terkait pelayanan publik dan pembangunan. Menurut Halim (2014) penyusunan APBD dapat didefinisikan sebagai rencana operasional pemerintah daerah, dimana satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya untuk membiayai kegiatan dan proyek pemerintah, dan di pihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan untuk menutupi pengeluaran pemerintah. Semakin meningkatnya belanja daerah maka pelayanan publik dan pembangunan akan semakin baik yang nantinya akan berdampak kepada peningkatan pendapatan asli daerah. Di sisi lain dalam rangka menggali sumber pendapatan asli daerah pemerintah juga perlu melaksanakan program kerja pemerintah dan melaksanakan pembangunan infrastruktur, dimana hal tersebut berkaitan dengan belanja daerah. Pembangunan infrastruktur yang baik akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya dampaknya akan kembali kepada pemerintahan yaitu berupa peningkatan PAD.

Pertumbuhan ekonomi yang tercermin dari produk domestik regional bruto menggambarkan potensi yang dimiliki suatu daerah. PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Semakin tinggi pendapatan masyarakat maka permintaan barang dan jasa akan semakin meningkat. Kemudian akan meningkatkan pajak dan retribusi daerahnya (Iman dkk, 2019).

Kemudian adapun penelitian terdahulu yang meneliti faktor apa saja yang diduga dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah. Penelitian oleh Fiddah (2017) di Kabupaten Maros memberikan hasil yakni PDRB dan Belanja Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Selain itu terdapat penelitian terdahulu yang memiliki variabel dependen yang sama yaitu penelitian oleh Iman, dkk (2019) di Kabupaten Bandung yang memberikan hasil Jumlah Penduduk, PDRB dan Belanja Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Selanjutnya penelitian oleh Ririn, dkk (2014) di seluruh Provinsi Indonesia memberikan hasil Investasi dan Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Kemudian Penelitian oleh Novitasari, dkk (2019) di Provinsi Jawa Timur memberikan hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Sedangkan DBH dan Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Selanjutnya penelitian oleh Darwis (2015) yang berjudul Pengaruh Belanja Modal Dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten / Kota Provinsi Sumatera Barat memberikan hasil belanja modal dan belanja pegawai berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

. Kemudian penelitian dampak Pandemi Covid-19 terhadap kinerja keuangan dari sisi pendapatan lebih banyak dilakukan pada perusahaan yang berorientasi laba dibandingkan dengan pemerintah daerah. Dampak Covid-19

terhadap penurunan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota karesidenan Surakarta menarik untuk dianalisis karena penelitian yang mengkaji mengenai pendapatan asli daerah pada masa pandemi Covid-19 masih belum banyak dilakukan. Dalam penelitian ini peneliti ingin meneliti itu Dampak Covid-19 terhadap penurunan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota karesidenan Surakarta melalui faktor yang diduga dapat mempengaruhi PAD. selain itu juga terdapat perbedaan hasil penelitian pada variabel Belanja Modal. Penelitian oleh Ririn,dkk (2014) dan penelitian oleh Darwis (2015) menyatakan bahwa Belanja Modal berpengaruh negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Akan tetapi penelitian oleh Novitasari (2019) menyatakan Bahwa Belanja Modal berpengaruh Positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini menggunakan tiga variabel independen yaitu Belanja Modal dan Produk Domestik Regional Bruto. Ketiga faktor tersebut dipilih karena diduga menjadi penyebab perbedaan jumlah pendapatan asli daerah yang diterima. Selama masa pandemi Covid-19 semua belanja pemerintah di fokuskan untuk menangani dampak pandemi Covid-19 sehingga menyebabkan proyek pembangunan yang dianggap kurang mendukung penanggulangan dampak pandemi Covid-19 perlu ditunda dulu. maka variabel Belanja Modal dipilih untuk mewakili kondisi tersebut. Kemudian variabel Produk Domestik Regional Bruto mewakili kondisi pertumbuhan ekonomi yang menurun akibat terbatasnya aktivitas ekonomi masyarakat akibat kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat selama masa pandemic Covid-19. Tujuan penelitian ini untuk membuktikan

pengaruh Belanja Modal dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap Pendapatan Asli Daerah.

1.2. Rumusan Masalah

Pendapatan asli daerah kabupaten dan kota di wilayah Karesidenan Surakarta mengalami trend penurunan di tahun 2020 akibat pandemi Covid-19. Belanja pemerintah di tahun 2020 di fokuskan kepada penanggulangan dampak pandemic Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Kemudian kebijakan pemerintah untuk melaksanakan pembatasan kegiatan masyarakat berdampak terhadap terganggunya aktivitas ekonomi masyarakat, sehingga jumlah produk domestik regional bruto (PDRB) mengalami penurunan di tahun 2020 mengakibatkan laju pertumbuhan ekonomi menurun. Maka rumusan masalah yang akan dijawab pada penelitian ini adalah:

1. Apakah belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan asli daerah?
2. Apakah Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah?

1.3. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak terlalu luas, maka dalam penelitian ini peneliti akan membatasi penelitian sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah

Menurut UU No.33 Tahun 2004 PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Belanja Modal

Menurut Pasal 55 PP No 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

3. Produk Domestik Regional Bruto

Menurut Badan Pusat Statistik Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode.

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh Belanja Modal dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap pendapatan asli daerah.

Selain itu Penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali variabel Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah.

1.5. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini dapat diketahui faktor apa saja yang menyebabkan penurunan atau kenaikan Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat menjadi referensi terkait kinerja keuangan daerah sehingga dapat berkontribusi terhadap ilmu pengetahuan akuntansi sektor publik.

2. Manfaat Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam pengambilan kebijakan terkait peningkatan kinerja keuangannya dari sisi penerimaan pendapatan asli daerah.